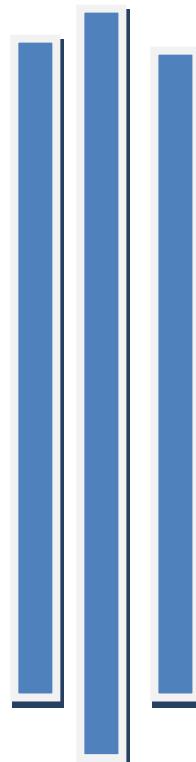




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2022**



**LPPD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan tuntunanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 dengan baik untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban dari setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur patut mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur atas kesediaan untuk mengevaluasi serta memberikan usul/saran dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila laporan yang kami sajikan ini kurang sesuai atau belum memenuhi harapan, baik menyangkut penyajian data dan penjelasan maupun teknik penyusunannya.

Semoga Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup dan karya kita selanjutnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			
KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			II
BAB I PENDAHULUAN			1
1.1	Latar Belakang		1
	1.1.1	Gambaran Umum Daerah	2
		A. Dasar Hukum	3
		B. Data Geografis Wilayah	6
		C. Jumlah Penduduk	9
		D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	11
		E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
		F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja	14
	1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	83
		A. Permasalahan dan Isu Strategis Pemerintahan Daerah	83
		B. Visi dan Misi Kepala Daerah	84
		C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD	88
		D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Tahunan	88
	1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	89
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			93
2.1	Capaian Kinerja Makro		93
	2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	93
	2.1.2	Angka Kemiskinan	94
	2.1.3	Angka Pengangguran	94
	2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	95
	2.1.5	Pendapatan Per Kapita	95
	2.1.6	KetimpanganPendapatan (Ratio Gini)	96

2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	96
	2.2.1 Urusan Wajib	97
	2.2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	97
	2.2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	122
	2.2.1.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	127
	2.2.2 Urusan Pilihan	128
	2.2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	128
	2.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	130
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	131
	2.3.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	132
	2.3.2 Dinas Kesehatan	137
	2.3.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	145
	2.3.4 Dinas Sosial	151
	2.3.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153
	2.3.6 Dinas Pertanahan	156
	2.3.7 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	157
	2.3.8 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)	159
	2.3.9 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	162
	2.3.10 Dinas Lingkungan Hidup	164
	2.3.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167
	2.3.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	171
	2.3.13 Dinas Perhubungan	174
	2.3.14 Dinas Komunikasi dan Informatika	176
	2.3.15 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	178
	2.3.16 Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	184
	2.3.17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	185
	2.3.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	188
	2.3.19 Dinas Pertanian	190
	2.3.20 Dinas Peternakan	193
	2.3.21 Sekretariat Dewan	196
	2.3.22 Inspektorat Daerah	198
	2.3.23 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	201

	Pengembangan Daerah	
2.3.24	Badan Keuangan Daerah	207
2.3.25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	209
2.3.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	210
2.3.27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211
2.3.28	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	213
2.3.29	Bagian Umum	216
2.3.30	Bagian Organisasi	217
2.3.31	Bagian Hukum	218
2.3.32	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	223
2.3.33	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	224
2.3.34	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	226
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		231
1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	231
2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	231
3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	232
3.1	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/ Kota	232
	3.1.1 Target Kinerja	232
	3.1.2 Realisasi	234
3.3.	Permasalahan dan Kendala	236
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	236
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		237
4.1	Urusan Pendidikan	237
4.2	Urusan Kesehatan	239
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	241
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	243
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	245
4.6	Urusan Sosial	247
4.7	Program dan kegiatan	249
BAB V PENUTUP		261